

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis peneliti yang dilandaskan pada kerangka teori mengenai kriteria dan indikator daerah tertinggal menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bahwa di dalam kriteria tersebut terdapat enam aspek yang menjadikan suatu daerah dikatakan tertinggal dimana di dalamnya terdapat kriteria perekonomian, sumber daya manusia, kemampuan keuangan daerah, infrastruktur, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Begitupun dengan upaya yang dilakukan agar Pasaman Barat keluar dari status daerah tertinggal dapat disimpulkan bahwasanya upaya yang dilakukan berjalan positif dan berada pada jalur yang benar dalam memenuhi target terbebas dari status daerah tertinggal pada tahun 2019.

Hasil penelitian ini menunjukkan permasalahan utama Pasaman Barat terletak pada kriteria sumber daya manusia, infrastruktur, perekonomian, dan karakteristik daerah. Empat dari enam kriteria yang ditetapkan Kementerian Desa dan PDT tersebut, berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan tidak bisa dikatakan gagal karena pada beberapa indikator mengalami perkembangan positif. Dari kriteria perekonomian dapat dilihat dari meningkatnya pengeluaran perkapita masyarakat, dan penurunan kemiskinan. Kriteria sumber daya manusia terjadi peningkatan pembangunan IPM dan upaya pengembangan pendidikan sebagai penunjang kualitas SDM juga mengalami peningkatan. Sumber daya manusia di Pasaman Barat masih rendah, hal ini terbukti dengan minimnya kemampuan dan kreasi masyarakat untuk

mampu berpartisipasi sebagai subjek dalam pembangunan, seperti yang dikemukakan oleh Almasdi Syahza dan Suarman. Kriteria infrastruktur menjadi salah satu prioritas dan terbukti dengan dibangunnya infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan dermaga, bandar udara dan infrastruktur ketenagalistrikan. Hal tersebut tentu terdapat peningkatan yang signifikan di bidang infrastruktur. Khusus untuk pembangunan infrastruktur telah mengalami peningkatan yang pesat mengingat infrastruktur di Pasaman Barat juga menjadi fokus nasional karena dianggap potensial. Disamping itu perlu diingat pembangunan infrastruktur juga harus diikuti dengan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu kriteria yang bukan menjadi penyebab ketertinggalan seperti aksesibilitas dan kemampuan keuangan daerah juga mengalami peningkatan seperti kriteria aksesibilitas yang juga terdorong dengan perkembangan infrastruktur. Kemudian keuangan daerah juga mengalami kenaikan dengan upaya dari sektor pajak. Namun terdapat semacam permainan elit politik yang mana status daerah tertinggal tersebut bisa dimanipulasi dengan tujuan untuk mendapatkan dana bantuan yang lebih besar dari pemerintahan pusat.

Pembangunan yang dilaksanakan juga belum dapat disimpulkan telah berhasil karena masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki disamping persoalan dana ada beberapa yang lainnya seperti koordinasi antar pemangku kepentingan, koordinasi dengan provinsi dan pusat, koordinasi antar OPD, validitas data yang tersedia, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan serta permainan politik para elit yang bisa memanipulasi data demi tujuan tertentu. Akan tetapi secara umum target untuk terlepas dari status daerah tertinggal pada tahun 2019 akan

tercapai. Selanjutnya yang perlu dilakukan pemerintah daerah Pasaman Barat adalah melakukan kontrol terhadap OPD yang ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan serta melakukan evaluasi berkala agar program pembangunan tetap sesuai dengan perencanaan serta tepat sasaran.

## 6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan untuk menindaklanjuti upaya pemerintah Pasaman Barat keluar dari status daerah tertinggal.

1. Kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Tugas bagi daerah yang menyangkut status daerah tertinggal adalah melakukan identifikasi dan penelitian kriteria mana saja yang menjadi penyumbang terbesar secara mendalam dan akurat sehingga data yang tersedia valid, dengan demikian pembangunan sebagai upaya keluar dari status daerah tertinggal seharusnya menjadi tepat sasaran.
2. Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat harus segera berbenah dan mendengar aspirasi masyarakat agar upaya keluar dari status daerah tertinggal bisa berjalan dengan maksimal dan dirasakan oleh masyarakat.
3. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus berupaya meningkatkan pendapatan daerah karena memiliki potensi yang sangat besar dari hampir

semua sektor, dengan demikian bisa menambah pemasukan daerah dan dapat digunakan untuk pembangunan sehingga tidak ada lagi keluhan mengenai anggaran yang tidak mencukupi.

4. Sistem koordinasi harus dievaluasi secara tuntas oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, OPD sebagai pelaksana, dan masyarakat supaya proses pembangunan sebagai perwujudan upaya keluar dari status daerah tertinggal dapat berjalan dengan sempurna dan dirasakan seluruh elemen masyarakat, bukan segelintir orang saja.

